

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor manufaktur memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta penguatan daya saing nasional. Dalam ekosistem bisnis modern, industri manufaktur menjadi tulang punggung pemenuhan permintaan pasar melalui proses produksi yang menekankan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 35 ribu perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia, menandakan peran penting industri ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di sektor ini, manufaktur tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, tetapi juga menjadi penopang utama aktivitas produksi nasional yang melibatkan rantai pasok luas dan jutaan tenaga kerja.

Peran strategis tersebut menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mengadopsi teknologi yang lebih maju, dan menjaga kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar global. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi tekanan yang semakin besar akibat dinamika ekonomi global, persaingan internasional, serta melemahnya permintaan domestik. Tantangan tersebut diperparah oleh

masuknya produk impor murah yang menyebabkan banyak industri dalam negeri sulit bersaing, sehingga mendorong penurunan kapasitas produksi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Kebijakan impor yang direvisi oleh pemerintah mengancam industri manufaktur di Indonesia. Kementerian Perdagangan melakukan relaksasi perizinan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dengan adanya peraturan ini produk elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, mainan, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup tidak memerlukan Pertek dari Kementerian Perindustrian dengan pengaturan pengawasan tetap di border, kecuali untuk kode HS tertentu. Tanpa Pertek, proses perizinan impor menjadi jauh lebih mudah bagi importir, sehingga berpotensi meningkatkan masuknya produk manufaktur asing ke pasar domestik. Kondisi ini menyebabkan arus barang impor tidak lagi terkontrol secara optimal dan melemahkan penataan data impor yang sebelumnya menjadi dasar penyusunan neraca komoditas industri.

Masuknya produk impor yang lebih murah, bervariasi, dan berkualitas menekan permintaan terhadap produk manufaktur lokal. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menegaskan bahwa kinerja industri manufaktur sangat bergantung pada kekuatan pasar domestik. Ketika permintaan dalam negeri menurun akibat dominasi produk asing, kinerja manufaktur nasional pun ikut melemah. Jika kondisi ini berlanjut,

dikhawatirkan industri manufaktur dalam negeri akan tersingkir dari pasar sendiri dan menghadapi tekanan finansial yang lebih berat (Cahyaningrum & Budiyantri, 2025).

Tabel 1.1 Data Laba Rugi Perusahaan Manufaktur

Sub Sektor	Kode	Laba Bersih dalam Rupiah		
		2024	2023	2022
Barang Baku (Sektor B IDX-IC)	DPNS	6,896,493,659	20,390,409,211	26,951,121,522
	WSBP	(920,214,030,926)	6,148,621,649	675,320,565,576
	SPMA	103,111,995,451	173,130,701,130	330,814,929,941
	TALF	25,453,385,287	37,711,997,359	138,721,742,965
Perindustrian (Sektor C IDX-IC)	ARNA	429,556,803,504	446,192,654,957	588,522,715,180
	MLIA	499,356,470	647,036,197	1,006,120,133
	ARKA	2,956,035,677	10,150,430,443	6,101,148,237
	LABA	(8,742,226,240)	(3,938,779,936)	(4,447,981,353)
Barang Konsumen Primer(Sektor D IDX-IC)	NASI	143,475,410	415,383,485	1,037,538,518
	SKBM	(78,800,278,137)	10,037,671,395	86,400,565,229
	TAYS	(67,428,702,632)	(18,752,508,743)	9,802,429,938
	TRGU	(62,1037,505,724)	1,029,038,618	49,851,187,887
Barang Konsumen (Sektor E IDX- IC)	KICI	(6,154,472,191)	(4,534,943,789)	1,544,433,254
	LMPI	(37,1030,895,986)	(28,951,659,103)	(22,041,711,834)
	RICY	(117,542,516,905)	(77,850,787,628)	(86,546,889,467)
	BIMA	(13,970,286,186)	(6,1030,417,191)	77,189,389,870
Kesehatan (Sektor F IDX- IC)	MERK	154,754,763	181,997,144	180,717,861
	PEHA	(288,720,115)	11,836,904	30,009,425
	PYFA	(387,675,099,381)	(85,296,986,735)	275,257,593,989
	TSPC	1,540,1032,748,241	1,233,661,029,781	1,061,189,459,765

Sumber : Data Sekunder dari www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa kinerja perusahaan pada tahun 2024 secara umum mengalami tekanan yang cukup berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sub sektor barang baku mencatatkan koreksi yang signifikan, di mana sebagian besar emiten seperti DPNS dan WSBP mengalami penurunan laba drastis, bahkan WSBP membukukan kerugian bersih sebesar 920 miliar rupiah. Sementara itu, sub sektor perindustrian dan barang konsumen primer juga didominasi oleh penurunan

laba dan peningkatan kerugian, terlihat dari ARNA dan MLIA yang labanya menciut, serta SKBM, TAYS, dan TRGU yang merugi besar. Kondisi lebih parah terjadi di sub sektor barang konsumen, di mana nyaris seluruh emiten seperti KICI, LMPI, RICY, dan BIMA membukukan kerugian, dengan RICY mencatat kerugian terbesar dibanding tiga tahun terakhir. Satu-satunya sektor yang masih relatif solid adalah sektor kesehatan, yang ditopang oleh TSPC dengan laba bersihnya yang terus tumbuh stabil, meskipun PYFA justru merugi tajam di tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, pelemahan kinerja perusahaan manufaktur tersebut tidak dapat dipisahkan dari dampak diberlakukannya Permendag No. 8 Tahun 2024 yang merelaksasi perizinan impor. Kebijakan ini menghapus kewajiban rekomendasi pertimbangan teknis (Pertek) untuk berbagai komoditas, sehingga arus barang impor meningkat signifikan dan menekan permintaan domestik terhadap produk manufaktur lokal. Kondisi ini tercermin dari data BPS yang menunjukkan bahwa industri pengolahan hanya mampu tumbuh 4,43 persen yang mana merupakan pertumbuhan terendah dalam tiga tahun terakhir. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih stagnan di angka 18,98%, jauh lebih rendah dibandingkan masa kejayaannya pada 1990-an ketika manufaktur menyumbang lebih dari 30% PDB.

Tekanan terhadap manufaktur juga tampak pada tren *Purchasing Managers' Index* (PMI) yang sempat berkontraksi selama lima bulan berturut-turut pada pertengahan hingga akhir 2024. Hal tersebut dapat

dilihat dalam Gambar 1.1 di mana PMI Manufaktur Indonesia memiliki skor di bawah angka 50 selama bulan Juli hingga November yang menandakan bahwa industri manufaktur Indonesia mengalami kontraksi dalam aktivitas industri. Kontraksi lima bulan berturut-turut ini menjadi catatan terburuk sejak awal pandemi Covid-19 tahun 2020, ketika aktivitas ekonomi terhenti drastis. Kondisi ini menunjukkan permintaan yang melemah, berkurangnya pesanan baru, serta tekanan dari sisi produksi dan stok bahan baku.



Gambar 1.1 PMI Manufaktur Indonesia

Sumber: GoodStats.id

Memasuki akhir 2024, PMI mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun secara rata-rata kinerja sepanjang tahun tetap lebih rendah dibandingkan 2023. Rata-rata PMI Manufaktur Indonesia pada 2024 tercatat 51,07, turun dari 52,06 pada 2023. Angka ini tetap berada di zona ekspansif, tetapi menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat. Sepanjang tahun 2024 PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan fase tekanan yang cukup berat, namun dengan pemulihan yang mulai terasa di akhir tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor manufaktur

masih rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan domestik, tetapi memiliki potensi untuk mempercepat ekspansi jika momentum pemulihan terus dijaga melalui kebijakan yang mendukung sektor riil.

Kemenperin menyatakan bahwa salah satu faktor lemahnya PMI Indonesia adalah sedikitnya regulasi yang mendukung industri dalam negeri. Regulasi saat ini justru mempersempit ruang gerak industri, kebijakan relaksasi impor merupakan satu dari sekian regulasi yang dapat memengaruhi permintaan domestik dan penjualan perusahaan. Maraknya produk impor dengan harga lebih murah dan variasi lebih banyak membuat konsumen beralih dari produk dalam negeri, sehingga perusahaan manufaktur nasional kehilangan pangsa pasar. Penurunan permintaan domestik ini berdampak langsung pada berkurangnya volume produksi, menurunnya utilisasi kapasitas, serta meningkatnya tekanan biaya bagi banyak perusahaan, terutama pada subsektor yang sensitif terhadap persaingan impor seperti tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki. Dengan demikian, kebijakan impor yang lebih longgar telah menjadi salah satu faktor kunci yang melemahkan kinerja manufaktur Indonesia sepanjang 2024 dan meningkatkan risiko tekanan finansial bagi industri manufaktur nasional.

Dampak paling nyata dari kondisi ini adalah maraknya penutupan pabrik dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai subsektor manufaktur. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, sekitar dua juta

pekerja manufaktur terdampak PHK akibat kebijakan relaksasi impor yang memicu serbuan barang impor murah dan melemahkan industri padat karya dalam negeri. Fenomena serupa juga terlihat pada paruh pertama 2025, di mana berbagai perusahaan besar, seperti PT Sritex, PT Asia Pacific Fibers, PT Danbi International, PT Yamaha Music, dan PT Sanken Indonesia, mengalami pailit, efisiensi besar-besaran, hingga penutupan permanen akibat penurunan permintaan, ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi baru, serta perpindahan produksi ke negara lain.

Kondisi ini tidak hanya mengguncang stabilitas ketenagakerjaan, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya kondisi keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia yang semakin rentan terhadap tekanan eksternal. perlunya strategi mitigasi risiko keuangan yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Pihak manajemen perusahaan perlu mengetahui dengan baik bagaimana keadaan perusahaan yang sebenarnya dan bagaimana prospek perusahaan kedepannya, begitupun dengan pihak eksternal perusahaan.

Berbagai kondisi tersebut mengindikasikan bahwa risiko *financial distress* pada perusahaan semakin meningkat, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi keuangan dan mendorong perusahaan menuju kebangkrutan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis laporan keuangan yang menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai rasio keuangan agar kinerja serta kesehatan finansial perusahaan dapat diukur secara lebih tepat.

Salah satu tanda perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan ialah perusahaan akan mengalami kesulitan dalam hal keuangannya atau yang dikenal sebagai *financial distress*. *Financial distress* adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan laba hingga ke laba negatif secara beruntun serta ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya yang jatuh tempo dengan kas operasi perusahaan (Indrati & Azizah, 2022; Islamiyatun, 2021; Kristanti, 2020). Kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang turut menentukan stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* salah satunya ialah *earning management*. Praktik manajemen laba atau yang disebut sebagai *earning management* umumnya dilakukan oleh pihak manajemen untuk menampilkan kinerja keuangan yang tampak lebih baik dari keadaan sesungguhnya. Namun, tindakan ini justru dapat menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dan meningkatkan probabilitas terjadinya kondisi *financial distress* di masa depan. Hal tersebut terjadi karena upaya manajemen dalam memanipulasi laba sering kali bertujuan menutupi kinerja buruk perusahaan, sehingga memperlambat pengungkapan dan melakukan penyelesaian atas masalah keuangan yang sebenarnya terjadi (Sayidah et al., 2020).

Kasus Indofarma menjadi contoh nyata bagaimana praktik earning management dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan hingga berujung pada financial distress. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP Investigatif periode 2020–2023, Indofarma terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan melalui penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, serta pencatatan fiktif yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Praktik manipulasi ini dilakukan untuk menutupi penurunan kinerja yang sudah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya, di mana laba perusahaan anjlok 99,65% pada 2020 dan berubah menjadi kerugian besar pada 2021 hingga 2023.

Tindakan tersebut menunjukkan bentuk earning management yang ekstrem, di mana manajemen berupaya menampilkan kinerja yang tampak wajar di mata publik maupun auditor, termasuk dengan tetap memperoleh opini wajar dari KAP pada beberapa tahun meskipun kondisi finansial memburuk. Akibat dari manipulasi ini, kondisi keuangan perusahaan semakin tertekan hingga tidak mampu membayar gaji karyawan sejak Maret 2024 dan akhirnya menghadapi kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar. Kasus Indofarma membuktikan bahwa earning management tidak hanya merusak kualitas laporan keuangan, tetapi juga dapat mendorong perusahaan menuju financial distress yang lebih dalam karena keputusan dan kebijakan diambil berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi.

Meskipun demikian, penelitian terkait pengaruh *earning management* terhadap *financial distress* masih terbatas dan jarang dijadikan fokus utama dalam studi sebelumnya. Di samping itu pula, hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agatha & Fathoni (2025) dan Haris & Ghozali (2023) menunjukkan hasil bahwa *earning management* berpengaruh signifikan negatif, namun penelitian yang dilakukan oleh Mardianto et al. (2025), Sawitri et al. (2025), Rinjani & Indrati (2024), dan Luu Thu (2023) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Efendi (2023) dan Kamau et al (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh *earning management* terhadap *financial distress*.

Selain *earning management*, faktor solvabilitas juga diperkirakan memiliki hubungan dengan *financial distress*. Solvabilitas merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi tingkat solvabilitas, artinya semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran juga meningkat. Kondisi ini dapat memperbesar risiko perusahaan mengalami *financial distress*, terutama ketika kemampuan menghasilkan laba tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayar (Alfinda, 2018 dalam Ginanjar & Rahmayani, 2021).

Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu contoh nyata bagaimana tingginya tingkat solvabilitas dapat mendorong

perusahaan menuju *financial distress* hingga berujung pailit. Sebelum mengalami krisis, Sritex melakukan ekspansi besar-besaran yang dibiayai melalui utang berbunga tinggi. Ketika pandemi Covid-19 melanda, pendapatan perusahaan anjlok hingga 35% pada 2021, sementara beban utang terus meningkat. Akibatnya, liabilitas Sritex melonjak drastis, bahkan mencapai Rp23,3 triliun pada 2021 dan terus meningkat hingga Rp24,5 triliun pada 2024.

Beban utang yang sangat besar tersebut membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, sehingga mengajukan restrukturisasi utang melalui PKPU. Situasi semakin memburuk dengan munculnya dugaan korupsi dalam pemberian kredit serta kegagalan perusahaan mengembalikan pinjaman kepada lebih dari 20 bank. Ketidakmampuan Sritex mengelola tingkat solvabilitasnya menjadi pemicu utama *financial distress*, yang akhirnya mendorong perusahaan dinyatakan pailit dan resmi berhenti beroperasi pada Maret 2025. Kasus ini menunjukkan bahwa solvabilitas yang terlalu tinggi tanpa manajemen risiko yang baik dapat menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh solvabilitas terhadap *financial distress* menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni et al. (2025), Apriyani et al. (2025), M. Fauzan et al. (2024), Ginanjar & Rahmayani (2021), Kusmawati et al. (2022), dan Subari (2024) membuktikan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh

Arisudhana et al. (2025), Febriyanti & Haryanto (2024) Kusmawati et al. (2022), Nuzurrahma & Fahmi (2022) Ramadani & Ratmono (2023), dan Taniva (2026) menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan negatif *financial distress* dan penelitian oleh Rinjani & Indrati (2024) dan Wangsih et al. (2021) yang menemukan pengaruh signifikan positif.

Faktor lain yang dapat memengaruhi *financial distress* ialah ukuran perusahaan atau yang dikenal sebagai *firm size*. Ukuran perusahaan (*firm size*) sering diasosiasikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengakses sumber daya dan pendanaan eksternal. Ukuran perusahaan (*firm size*) berperan penting dalam menentukan kemampuan perusahaan menghadapi risiko *financial distress*. Perusahaan dengan total aset yang besar umumnya dianggap lebih stabil dan memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Pengaruh *firm size* terhadap *financial distress* pada dilihat dari perbandingan dua perusahaan manufaktur yang memproduksi minuman ringan sepanjang tahun 2024, yaitu antara PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) dan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO). Perbandingan kedua perusahaan tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana *firm size* berperan dalam menentukan ketahanan perusahaan menghadapi tekanan keuangan. ALTO, yang termasuk perusahaan manufaktur berskala kecil, mengalami tekanan finansial yang berat hingga harus menghentikan operasional anak usahanya, PT Tirtamas Lestari, karena pendapatan yang anjlok hingga 70% dan kerugian yang meningkat menjadi Rp11 miliar pada semester I-2024.

Terbatasnya aset, kapasitas produksi, dan jaringan distribusi membuat ALTO tidak mampu menutup biaya operasional, sehingga perusahaan terpaksa menutup pabrik, menjual aset, mencari investor baru, hingga menghadapi gugatan PKPU akibat tunggakan kepada vendor.

Sebaliknya, CLEO sebagai perusahaan berskala besar dengan 32 pabrik di seluruh Indonesia justru menunjukkan kinerja yang sangat kuat pada tahun yang sama. CLEO berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 29% hingga mencapai Rp2,7 triliun dan meraih laba bersih Rp470 miliar, naik 46% dibanding 2023. Skala aset yang besar dan kemampuan distribusi nasional memungkinkan CLEO tetap bertumbuh melalui ekspansi pabrik dan inovasi produk. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat kapasitasnya dalam bertahan menghadapi tekanan ekonomi, sedangkan perusahaan kecil lebih rentan mengalami *financial distress* karena keterbatasan sumber daya dan kelemahan struktur keuangan.

Besarnya aset menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat kematangan dalam operasionalnya, dengan arus kas yang cenderung positif serta prospek usaha yang baik dalam jangka (Wangsih et al., 2021b). Sementara itu, perusahaan berskala besar juga cenderung lebih dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan karena dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko dan menghindari potensi kebangkrutan (Putri & Nr, 2020). Dengan demikian, semakin besar ukuran

perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait pengaruh antara *firm size* terhadap *financial distress* menunjukkan adanya hasil yang inkonsisten. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *firm size* terhadap *financial distress* menunjukkan juga hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmawati et al. (2022), Subari (2024), dan Taniva (2026) menunjukkan bahwa *firm size* tidak memengaruhi *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Haryanto (2024), Maula et al. (2023) dan Wangsih et al. (2021) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan negatif *financial distress*.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti menyadari bahwa literasi untuk menganalisis *financial distress* sangatlah penting untuk dilakukan khususnya terkait pengaruh *earning management*, solvabilitas, dan *firm size* terhadap *financial distress*. Namun, ditemukan hasil yang inkonsisten dalam hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh *earning management*, solvabilitas, dan *firm size* terhadap *financial distress* serta masih sedikitnya penelitian yang mengkaji pengaruh *earning management* terhadap *financial distress*. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan regresi linear berganda dan regresi data panel yang umumnya diterapkan pada data dengan variabel dependen bersifat kontinu. Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan

tersebut mengalami distress atau tidak. Maka dari itu, penelitian menggunakan metode regresi logistik untuk memodelkan probabilitas terjadinya perusahaan mengalami *financial distress*.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan periode pengamatan terbaru, yaitu tahun 2022–2024, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada periode sebelum tahun 2022–2024 yang mana belum mencakup tahun direvisinya kebijakan Permendag No. 8 tahun 2024 serta gelombang kebangkrutan dan PHK massal yang baru terjadi di 2024 dan 2025. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *earning management*, solvabilitas, dan *firm size* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan di sektor manufaktur.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?

- b. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
- c. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *earning management* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan dijadikan acuan penelitian untuk bidang akuntansi keuangan, terutama bagi yang ingin meneliti

Earning Managament, Solvabilitas dan *Firm Size* terhadap *Financial Distress*.

- b. Adanya pembuktian atas gap penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Earning Managament, Solvabilitas dan *Firm Size* terhadap *Financial Distress*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan keuangan mengenai bagaimana pengaruh *Earning Managament*, Solvabilitas dan *Firm Size* dapat menimbulkan *Financial Distress* sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menghindari risiko kebangkrutan.
- b. Memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan eksternal mengenai bagaimana pengaruh *Earning Managament*, Solvabilitas dan *Firm Size* dapat menimbulkan *Financial Distress* menilai kesehatan keuangan perusahaan serta mempertimbangkan risiko investasi dan kredit.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber data empiris yang dapat digunakan dalam kegiatan akademis dan penelitian selanjutnya yang berfokus pada topik terkait.